
Studi Ketenagakerjaan Jawa Tengah: Analisis Data Sakernas 2019-2022

Dewi Novita Sari¹, Lilis Anisah^{*1}

¹BPS Provinsi Jawa Tengah

*lilis.anisah@bps.go.id: dnovita@bps.go.id

Abstrak

Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kajian ini bertujuan untuk mencermati kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah melalui beberapa indikator. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun TPAK di Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun, namun kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan masih lebar. TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan dan TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan. TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu paling tinggi dibandingkan dengan TPT lulusan tingkat pendidikan lainnya. Empat lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah adalah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan dan lapangan usaha konstruksi. Sedangkan empat lapangan usaha dengan peningkatan tenaga kerja terbanyak di Jawa Tengah pada Agustus 2022 adalah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha jasa lainnya.

Kata Kunci: pekerja, pengangguran, struktur lapangan usaha, TPAK, TPT.

DOI: 10.47198/naker.v18i3.259

Dikirim: 29-10-2023

Dipublikasikan: 1-12-2023

1. Pendahuluan

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset dan potensi wilayah. Namun jika penduduk tidak mampu berkarya secara produktif akan menjadi beban bagi wilayah setempat. Data yang bersumber dari enam periode Sensus Penduduk (SP) mencatat bahwa komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan usia lanjut (usia 65+) di Jawa Tengah semakin meningkat, sedangkan komposisi penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) semakin turun (BPS Jawa Tengah, 2022).

Saat penduduk usia produktif lebih besar bahkan sampai dengan dua kali lipat, artinya mereka hanya sedikit menanggung beban hidup. Kondisi ini menjadi keuntungan suatu wilayah hanya jika penduduk usia produktif adalah mereka yang berstatus bekerja. Sebaliknya, kondisi ini akan bersifat destruktif jika penduduk usia produktif justru menjadi beban karena tidak mampu memanfaatkan produktivitasnya dalam aktivitas bekerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu poin yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Jawa Tengah. Salah satu misi pembangunan daerah dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah dimana manusia ditempatkan sebagai fokus pembangunan, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis mengenai isu ketenagakerjaan di Jawa Tengah.

Kajian terkait ketenagakerjaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Fajri (2019) meneliti dengan teknik wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai profil tenaga kerja milenial di Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Sari (2021) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengangguran maka PDRB akan menurun sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan menurun dan kemiskinan meningkat.

Yuliana, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2019. Penelitian ini memberikan hasil bahwa inflasi, kemiskinan, pendidikan dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Aqil (2023) menganalisis data sakernas 2021 terkait ketenagakerjaan pekerja lanjut usia dan perubahannya saat pandemi COVID-19 di Indonesia menurut jenis pekerjaannya, menyatakan bahwa sebagian besar pekerja lansia memilih untuk bekerja sebagai pekerja mandiri/wiraswasta informal.

Kajian ini bertujuan untuk mencermati profil ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Melalui analisis deskriptif yang dilakukan, ingin diketahui bagaimana profil ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan struktur lapangan usaha.

Hasil analisis akan bermanfaat sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Selain bermanfaat bagi pemangku kebijakan, hasil kajian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan terkait ketenagakerjaan.

2. Metode Penelitian

Data utama yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dikumpulkan pada bulan Agustus tahun 2019-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data Sakernas dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 27.309 rumah tangga. Sebagai tambahan informasi, sejak Sakernas Agustus 2020, penghitungan indikator menggunakan estimasi hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015).

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi dan grafik. Tabulasi yang digunakan adalah tabel dua arah, sedangkan grafik yang digunakan antara lain grafik batang, grafik garis untuk menunjukkan beberapa indikator ketenagakerjaan secara runtun waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan berupa persentase banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, terhadap penduduk usia kerja. Terkait konsep kependudukan dan ketenagakerjaan dalam kajian ini, konsep dan definisi dasar yang digunakan oleh BPS merupakan rekomendasi PBB untuk menjaga keterbandingan data dengan negara lain.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tergolong sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi termasuk sebagai “bukan angkatan kerja”.

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang tergolong sebagai angkatan kerja di Jawa Tengah sebanyak 18,42 juta jiwa pada Agustus 2019 semakin meningkat hingga 19,47 juta jiwa pada Agustus 2022. Sedangkan penduduk usia kerja yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja walaupun cukup fluktuatif namun cenderung menurun, dari 8,35 juta jiwa pada Agustus 2019 menjadi 8,02 juta jiwa di Agustus 2022.

Berdasarkan statistik tersebut di atas, secara relatif indikator TPAK Jawa Tengah selama empat tahun terakhir bergerak naik dari angka 68,81 persen pada tahun 2019 ke angka 70,84 persen pada tahun 2022 (kondisi bulan Agustus).



Gambar 1. Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan TPAK Jawa Tengah, 2019 – 2022

Sumber: BPS, diolah (2020-2023)

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Peningkatan angka TPAK sebagaimana diuraikan di atas memberi arti bahwa penduduk usia kerja yang siap bekerja atau aktif secara ekonomi di Jawa Tengah semakin meningkat.



Gambar 2. TPAK Jawa Tengah menurut Jenis Kelamin, 2019 – 2022 (Persen)

Sumber: Sakernas 2019-2022, diolah

Apabila dicermati menurut jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK perempuan berada pada kisaran angka 55-58% jauh di bawah laki-laki yang berada pada angka lebih dari 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang aktif secara ekonomi lebih rendah daripada laki-laki. Dapat dimaklumi mengingat perempuan lebih banyak berperan di sektor domestik: rumah tangga. Kegiatan mengurus rumah tangga yang identik dengan peran perempuan, menjadi satu indikasi rendahnya TPAK perempuan dibanding TPAK laki-laki.

Jurang kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan ini agaknya sejalan dengan hasil penelitian Nuraeni dan Suryono (2021) yang menyatakan bahwa ketimpangan gender di pasar kerja dipengaruhi dua hal, yaitu institusi pemberi kerja dan sosial budaya.

Masih ada anggapan dari institusi pemberi kerja, bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, bahwa posisi tertentu yang lebih layak diisi oleh laki-laki serta masih adanya stigma yang melekat bahwa perempuan kurang produktif. Sedangkan secara sosial budaya, kultur patriarki membuat perempuan lebih banyak berperan dalam sektor domestik: rumah tangga.

Namun demikian, Gambar 2 menjelaskan bahwa peran perempuan untuk aktif secara ekonomi semakin meningkat. Dari 55,35 persen hasil Sakernas 2019, TPAK perempuan makin meningkat menjadi 58,31 persen. Pandemi sepertinya semakin memberdayakan perempuan untuk aktif secara ekonomi.

3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

BPS mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasa disebut sebagai tingkat pengangguran, merupakan indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.



Gambar 3. Perbandingan TPT Provinsi se-Pulau Jawa, Agustus 2022

Sumber: Sakernas 2022, diolah

Pada Agustus 2022, dari 6 provinsi di Pulau Jawa, TPT Jawa Tengah berada pada urutan keempat tertinggi setelah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Namun secara nasional, angka TPT Jawa Tengah yang sebesar 5,57 persen berada di bawah angka nasional yang sebesar 5,86 persen. Sementara secara nasional, Jawa Tengah menduduki peringkat ke 11 sebagai provinsi dengan TPT tertinggi.

Sukirno (2008) menyatakan bahwa tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) merupakan tingkat pengangguran yang tak mungkin dihilangkan saat perekonomian mampu menyerap tenaga kerja secara penuh (*full employment*). Lebih lanjut, Sukirno menyatakan bahwa kondisi tersebut tercapai saat tingkat pengangguran pada kisaran 2 - 3 persen.

Dimas dan Woyanti (2009) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran pada kisaran 4 persen merupakan tingkat pengangguran yang wajar terjadi dalam perekonomian. Sedangkan Wardhana (2022) menyatakan bahwa tingkat pengangguran alamiah kemungkinan besar dipengaruhi dan ditentukan oleh situasi di tiap negara. Beberapa negara secara tradisi mampu mempertahankan TPT di kisaran sangat rendah (1-2 persen), tetapi di negara berkembang umumnya berkisar di 5-6 persen.



Gambar 4. Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka (Juta Orang) dan TPT (%) di Jawa Tengah, Agustus 2019 – Agustus 2022

Sumber: Sakernas 2019-2022, diolah

Gambar 4 memperlihatkan bahwa TPT Jawa Tengah pada Agustus 2019 tercatat sebesar 4,44 persen, meningkat menjadi 6,48 persen pada Agustus 2020, kemudian turun kembali menjadi sebesar 5,95 persen di Agustus 2021 dan makin turun menjadi sebesar 5,57 persen pada Agustus 2022. TPT sebesar 5,57 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang penganggur.

Secara makro, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah melonjak drastis dari sekitar 800 an ribu penganggur pada Agustus 2020 menjadi 1,21 juta penganggur pada Agustus 2020. Kondisi ini terjadi seiring dengan masuknya wabah Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020. Setelah melewati periode Agustus 2020, baik secara absolut maupun secara persentase (ditunjukkan oleh indikator TPT), jumlah pengangguran Jawa Tengah secara perlahan berangsur menurun. Namun demikian, penurunan TPT tersebut belum kembali ke kondisi TPT sebelum pandemi pada kisaran 4 persen.

3.2.1. TPT Jawa Tengah menurut Jenis Kelamin dan Wilayah



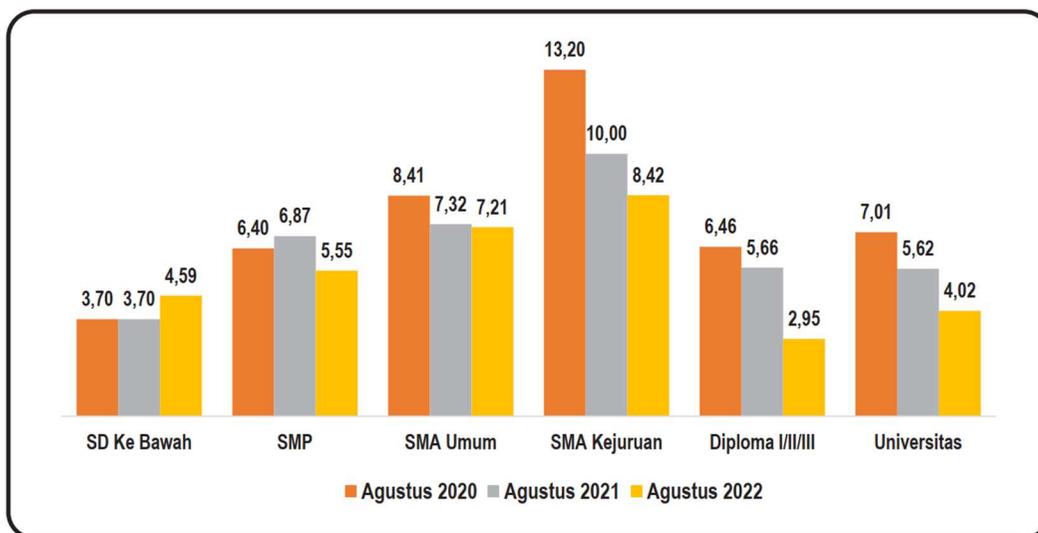
Gambar 5. TPT Jawa Tengah menurut Jenis Kelamin dan Wilayah (Persen), Agustus 2019-Agustus 2022
Sumber: Sakernas 2019-2022, diolah

Gambar 5 menunjukkan bahwa jika dibedakan menurut jenis kelamin, secara umum TPT laki-laki Jawa Tengah lebih tinggi dibanding TPT perempuan. Setelah melewati periode Agustus 2020, TPT laki-laki terus menunjukkan penurunan namun tidak demikian halnya dengan TPT perempuan yang terlihat berfluktuasi. TPT laki-laki sebesar 5,75 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja berjenis kelamin lelaki, terdapat sekitar enam orang penganggur. Sedangkan TPT perempuan sebesar 5,31 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja berjenis kelamin perempuan, terdapat sekitar lima orang penganggur.

Apabila dicermati menurut wilayah perkotaan perdesaan, TPT perkotaan lebih tinggi dibanding TPT perdesaan. TPT perdesaan menunjukkan penurunan setelah periode Agustus 2020, namun tidak dengan TPT perkotaan yang sempat turun pada Agustus 2021 kemudian meningkat kembali pada periode Agustus 2022. TPT di wilayah perkotaan sebesar 7,39 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja di wilayah perkotaan,

terdapat sekitar tujuh orang penganggur. Sedangkan TPT di wilayah perdesaan sebesar 3,63 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja di wilayah perdesaan, terdapat sekitar tiga sampai 4 orang penganggur.

3.2.2. TPT Jawa Tengah menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



Gambar 6. TPT Jawa Tengah menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen), Agustus 2020-Agustus 2022
 Sumber: Sakernas 2020-2022, diolah

TPT berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan memberi makna bahwa terdapat penawaran tenaga kerja yang berlebih pada suatu tingkat pendidikan tertentu, dibandingkan dengan lowongan yang tersedia pada jenjang pendidikan yang ditamatkan tersebut.

Gambar 6 menunjukkan bahwa TPT lulusan SMA Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi besarnya dalam 3 periode terakhir. Dapat dimaknai bahwa, perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka pada tamatan SMK dengan jumlah angkatan kerja tamatan SMK, paling besar nilainya, jika dibandingkan dengan TPT pada jenjang tamatan pendidikan lainnya. Walaupun demikian, TPT tamatan SMK dan hampir semua TPT di setiap jenjang pendidikan lainnya, mengalami trend menurun pada Agustus 2023 kecuali TPT tamatan SD ke bawah yang justru meningkat.

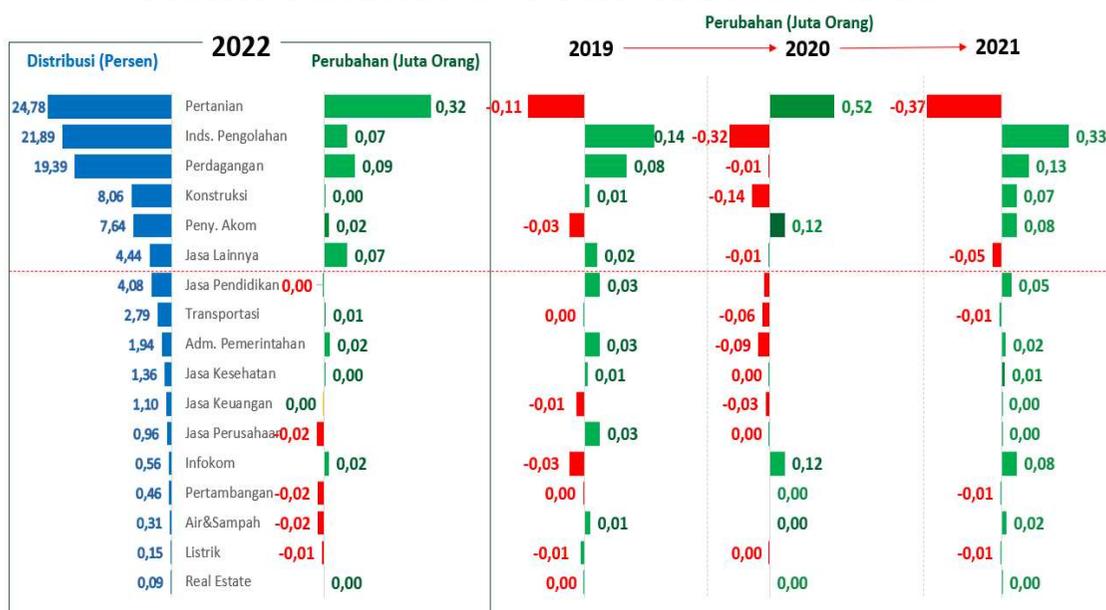
TPT tamatan SD ke bawah sebesar 4,59 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa sekitar 4-5 orang dari 100 angkatan kerja pada jenjang tamatan SD ke bawah, adalah pengangguran. TPT tamatan SMP sebesar 5,55 persen pada Agustus 2022 memberi makna bahwa sekitar 5 sampai 6 orang dari 100 angkatan kerja pada jenjang tamatan SMP, adalah pengangguran. Demikian seterusnya untuk pemaknaan angka TPT tamatan SMA Umum hingga Universitas.

Semua kondisi ini menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menurunkan TPT secara konsisten sejalan dengan upaya mewujudkan *full employment* dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

3.3. Struktur Penyerapan Penduduk Bekerja di Jawa Tengah dan Perubahannya menurut Lapangan Usaha

Struktur penyerapan penduduk bekerja menurut lapangan usaha diketahui dari komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Komposisi ini menggambarkan penyerapan masing-masing lapangan usaha seperti yang ditampilkan pada Gambar 7.

DISTRIBUSI DAN PERUBAHAN PENDUDUK BEKERJA JAWA TENGAH



Gambar 7. Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Perubahannya, 2021-2022

Sumber: Sakernas Agustus 2021-2022, diolah

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang masih menjadi penyangga perekonomian di Jawa Tengah adalah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan. Pola dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan kondisi Agustus 2019 hingga Agustus 2022.

Selain memperlihatkan struktur penyerapan penduduk bekerja menurut lapangan usaha tahun 2022, Gambar 7 menyajikan fluktuasi perubahan pekerja pada 17 lapangan usaha di Jawa Tengah tahun 2019 hingga 2022. Salah satu yang menarik untuk diulas adalah lapangan usaha pertanian sebagai salah satu penyangga utama ekonomi Jawa Tengah. Sempat berkurang pada tahun 2019, pekerja pertanian di masa pandemi justru mengalami peningkatan terbesar (dalam satuan juta orang pekerja) jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Besarnya penyerapan sekaligus peningkatan jumlah tenaga kerja di lapangan usaha ini dimungkinkan

karena sebagian pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, beralih ke pertanian yang kurang membutuhkan keahlian tertentu sehingga lebih mudah untuk dimasuki para tenaga kerja.

Saat pandemi berangsur pulih, pada tahun 2021 pekerja pertanian mulai beralih ke lapangan usaha lain ditandai dengan berkurangnya jumlah pekerja pada lapangan usaha tersebut sekaligus peningkatan jumlah pekerja di lapangan usaha non pertanian. Seiring waktu, di tahun 2022, Kembali terjadi peningkatan pekerja pertanian sejalan dengan makin meningkatnya fenomena petani milenial dan pertanian modern.

Empat kategori lapangan pekerjaan yang nampak menonjol terkait peningkatan jumlah tenaga kerja dalam setahun terakhir selain lapangan usaha pertanian dengan peningkatan tenaga kerja sejumlah 324,03 ribu orang, adalah lapangan usaha perdagangan sebanyak 93,59 ribu orang, lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 71,50 ribu orang, dan lapangan usaha jasa lainnya sebanyak sekitar 70-an ribu orang tenaga kerja.

Dapat dicermati bahwa setidaknya tiga lapangan usaha utama telah sejalan, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja (tergambar melalui distribusi penduduk bekerja) maupun peningkatan jumlahnya dalam setahun terakhir. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun TPAK di Jawa Tengah semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan tidak banyak berubah, bahwa partisipasi perempuan yang aktif secara ekonomi lebih rendah daripada laki-laki. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa di saat TPAK laki-laki berfluktuasi pada Agustus 2019-2022, TPAK perempuan meningkat secara konsisten.

Jumlah pengangguran Jawa Tengah masih dalam taraf wajar dalam rentang 4-6 persen. Jawa Tengah sedang dalam upaya pulih dari pandemi, ditandai dengan TPT yang secara perlahan berangsur menurun. Namun demikian, penurunan TPT tersebut belum kembali ke kondisi TPT sebelum pandemi pada kisaran 4 persen.

Rendahnya TPT perdesaan dibandingkan perkotaan jika dihubungkan dengan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada September 2022, mengindikasikan bahwa wilayah perdesaan di Jawa Tengah cenderung lebih miskin dibandingkan wilayah perkotaan. Dalam kondisi miskin, penduduk di perdesaan tidak punya pilihan untuk menganggur.

Hasil Sakernas Agustus 2019-2022 menyatakan bahwa TPT lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selalu paling tinggi dibandingkan dengan TPT lulusan tingkat pendidikan lainnya. Walaupun demikian, TPT tamatan SMK dan hampir semua TPT di setiap jenjang pendidikan lainnya, mengalami trend menurun pada Agustus 2022 kecuali TPT tamatan SD ke bawah yang justru meningkat.

Belum ada perubahan struktur lapangan usaha penyerap tenaga kerja di Jawa Tengah dalam empat tahun terakhir. Empat lapangan usaha yang sama, masih menjadi penyerap tenaga kerja

terbesar di Jawa Tengah. Lapangan usaha tersebut adalah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan dan lapangan usaha konstruksi.

Perubahan tenaga kerja berfluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, empat lapangan usaha dengan peningkatan terbanyak di Jawa Tengah adalah lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha jasa lainnya.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, kondisi tersebut sepatutnya menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Perhatian yang bermanfaat antara lain upaya tambahan lapangan pekerjaan yang bisa menampung angkatan kerja, bisa dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pelatihan ketrampilan untuk peningkatan kompetensi SDM, kebijakan lokal terkait penyerapan minimal sekian persen tenaga kerja lokal bagi perusahaan yang didirikan di wilayah setempat, meluaskan kerjasama dengan berbagai perusahaan di lingkungan setempat dll.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perlu kiranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi perhatian terhadap lapangan usaha pertanian yang menjadi tulang punggung pekerja Jawa Tengah, dengan daya serap dan peningkatan tenaga kerja tertinggi di tahun 2022. Perhatian dari pemangku kepentingan dapat berupa dukungan nyata bagi petani milenial, berbagai pelatihan, perluasan pasar kerja, perbaikan infrastruktur untuk kemudahan distribusi hasil panen menjadi beberapa hal yang dapat diupayakan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap lapangan usaha pertanian. Pertanian merupakan lapangan usaha strategis penyedia bahan pangan bagi seluruh penduduk. Lapangan usaha pertanian menjadi lapangan usaha yang teruji tangguh saat Jawa Tengah dihantam pandemi 2020 lalu. Ketika Jawa Tengah mengalami kontraksi di masa pandemi, lapangan usaha pertanian mampu tumbuh positif. Semua kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya lapangan usaha pertanian dalam menopang perekonomian Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Aqil, M.A. (2023). Kondisi Ketenagakerjaan Pekerja Lanjut Usia dan Perubahannya Saat Pandemi COVID-19 di Indonesia Menurut Jenis Pekerjaannya: Analisis Data Sakernas 2021. *Jurnal Ketenagakerjaan Volume 18 No. 1, 2023, Hal. 81-94.*
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2020-2023), "Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Agustus 2019-2022", Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- BPS. (2023). Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). *Website BPS.* https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/oooo/api_pub/WjNUbVprTDh4SjN4RXhLaUptMHZqQT09/da_03/1
- Dimas, Woyanti, N. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi.* 16(1) : 32-41. Diunduh dari [https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/313/198.](https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/313/198)
- Fajri, DK. (2019). Profil Tenaga Kerja Milenial di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding FRIMA-2019, 409-412. FM-2019-L16 (Deni Kusuma Fajri - UNAIR).pdf(stembi.ac.id)*

- Kemenko PMK. (2021). Hasil Survei Penduduk 2020 Peluang Indonesia Maksimalkan Bonus Demografi. *Website Kemenko PMK*. Hasil Survei Penduduk 2020 Peluang Indonesia Maksimalkan Bonus Demografi | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id)
- Laane, NAH, S.Pd. (2022). Tantangan Guru, Menyambut Bonus Demografi 2030. *Website Kementrian Agama Gorontalo, Fitur Opini*. <https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/488/tantangan-guru-menyambut-bonus-demografi-2030>
- Nuraeni, Y. dan Suryono, I.L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 68-79*.
- Sari, Y.A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium, Vol. 10, No. 2, Hal. 121-130*.
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wardhana, D. (2022). Tingkat Pengangguran Alamiah. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/16/tingkat-pengangguran-alamiah>.
- Yuliana, T., Laut, L.T., Jalunggono, G. (2020). Analisis Determinasi Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2019. *Dinamic: Directory Journal of Economic, Vol. 2, No. 2, Hal. 515-527*.